

KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK WISATA ALAM GUNUNG SEMPANA SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Institutional Capacity of Mount Sempana Natural Tourism Grup, Sembalun, East Lombok Regency

Muhammad Rifaldi Rahman¹, Andi Chairil Ichsan¹, Hairil Anwar¹

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram JL. Pemuda,
Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat 83114

Email: aldi6653@gmail.com

ABSTRACT

KWA Gunung Sempana is a partner group for managing the ecotourism of Mount Sempana which is one of the forest areas managed by BKPH Rinjani Timur. By using PP no. 57 of 2014 as a tool to determine the level of capacity of the Gunung Sempana KWA in managing and the 2009 WWF Document as a guideline in analyzing the forms and patterns of partnerships built at Mount Sempana. The method in this study used the interview and observation method. Based on research conducted to determine the institutional capacity of the group, KWA Gunung Sempana is in the middle-class category with a total score of 625 points based on PP No. 57 of 2014. Then to find out the pattern of partnership built by BKPH Rinjani Timur with KWA Gunung Sempana for area management based on the 2009 WWF Document, it received a suspension of 2788 points which was in the high criteria (T). By analyzing the respondents' answers, it can be seen that the partnership pattern carried out is a community-based ecotourism partnership pattern.

Keyword: *Sempana Mountain Nature Tourism Area, Institutional Capacity, Partnership*

ABSTRAK

KWA Gunung Sempana adalah kelompok mitra pengelola ekowisata Gunung Sempana yang merupakan salah satu kawasan hutan yang dikelola oleh BKPH Rinjani Timur. Dengan menggunakan PP no.57 Tahun 2014 sebagai alat untuk mengetahui tingkat kapasitas KWA Gunung Sempana dalam melakukan pengelolaan serta Dokumen WWF tahun 2009 sebagai pedoman dalam menganalisis bentuk dan pola kemitraan yang dibangun di Gunung Sempana. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan kelompok tersebut, KWA Gunung Sempana berada pada kategori kelas madya dengan total skor sebesar 625 poin berdasarkan PP Nomor. 57 Tahun 2014. Kemudian untuk mengetahui pola kemitraan yang dibangun oleh BKPH Rinjani Timur dengan KWA Gunung Sempana terhadap pengelolaan kawasan berdasarkan Dokumen WWF tahun 2009 mendapatkan Skors sebesar 2788 poin yang berada pada kriteria tinggi (T). Dengan dilakukan analisis terhadap jawaban responden dapat diketahui bahwa pola kemitraan yang dilakukan merupakan pola kemitraan ekowisata berbasis masyarakat.

Kata Kunci: KWA Gunung Sempana, Kapasitas Kelembagaan, Pola Kemitraan

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu industri yang bergerak pada bidang pelayanan dan jasa yang menjadi prioritas Indonesia untuk mendorong devisa Negara. Perkembangan pariwisata Indonesia yang sangat besar dan beragam dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik dan menjadi tujuan utama wisata dunia. Untuk saat ini para wisatawan lebih memilih wisata alam yang dikombinasi peran serta masyarakat dalam kebudayaan sosial kemasyarakatannya (Hakim, *et al*, 2019 *cit*. Ridwan, 2017). NTB saat ini sedang menggalakan kampanye pariwisata khususnya di Lombok. Kegiatan wisata merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan jamak dari kegiatan wisata itu sendiri. Selain kegiatan wisata konvensional adapula kegiatan wisata yang lebih tertuju pada nilai konservasi dan pemberdayaan masyarakat yaitu ekowisata.

Pola ekowisata berbasis masyarakat merupakan pola pengembangan ekowisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keuntungan yang diperoleh. Masyarakat setempat yang memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi mutlak. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekowisata berarti mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat maupun sebagai pengelola (Dalem, 2002 *cit* Masyhudi, L. 2018).

Salah satu ekowisata yang menerapkan pola pengelolaan berbasis masyarakat yang berada di NTB adalah Gunung Sempana, terletak pada desa Sembalun Bumbung, kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Secara administratif Gunung Sempana masuk kedalam wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan wilayah pengelolaan BKPH Rinjani Timur. Gunung ini memiliki potensi keindahan yang dapat dinikmati seperti *sunrise point*, savana yang membentang indah, *camping ground* dan juga *spot foto*.

Keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata di Gunung Sempana antara lain, pengelolaan jalur transportasi menuju Gunung Sempana, sarana dan prasarana, serta *basecamp* untuk melakukan registrasi dan tempat parkir yang memadai. Namun, permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada penyediaan tempat parkir dan perdagangan. Permasalahan lain yang terjadi adalah masih kurangnya kerjasama dengan investor dan instansi-instansi lain, masih kurangnya informasi tentang Gunung Sempana kepada wisatawan sehingga tingkat pengunjung masih belum maksimal.

Dalam rangka memaksimalkan sistem pola pengelolaan Gunung Sempana agar lebih baik lagi, perlu dilakukan kajian dalam rangka meninjau keterlibatan masyarakat dalam seluruh aspek pengelolaan wisata. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang Analisis Kapasitas Kelembagaan Kelompok Wisata Alam Gunung Sempana di Gunung Sempana Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kapasitas kelembagaan Kelompok Wisata Alam Gunung Sempana dalam pengelolaan ekowisata di Gunung Sempana.
2. Mengetahui pola kemitraan ekowisata berbasis masyarakat di Gunung Sempana

METODE

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh (Siyoto, S. *Et.al* 2015). Penelitian ini dilaksanakan di Gunung Sempana, Desa Sembalun Bumbung, kecamatan sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, masyarakat yang berada pada sekitar kawasan Gunung Sempana. Penelitian ini menggunakan Lembaga pengelola, Mitra pengelola (KWA Gunung Sempana) dan masyarakat sekitar kawasan Gunung Sempana sebagai unit analisis Penelitian ini dilaksanakan di Gunung Sempana, desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

Penentuan lokasi penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut (Siyoto, *et al.*, 2015) Pertimbangan penentuan lokasi penelitian yaitu, memiliki potensi wisata yang sedang berkembang dan menjadi tujuan wisata, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara dan merupakan kawasan hutan lindung dibawah pengelolaan BKPH Rinjani Timur. Penentuan responden menggunakan teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Responden tersebut terbagi kedalam beberapa kelompok yaitu:

1. Pengelola kawasan Gunung Sempana (BKPH Rinjani Timur)
 2. Pelaku wisata yang berada pada kawasan Gunung Sempana (KWA Gunung Sempana)
- Metode pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode observasi dan wawancara. Pengumpulan data melalui kuesioner atau angket sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Sedangkan metode observasi menurut (Sugiyono 2015). Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 57 Tahun 2014 dan dokumen WWF tahun 2009. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 57 Tahun 2014 Dalam mengetahui kapasitas KWA Gunung Sempana perlu adanya pengetahuan dalam kelola kelembagaan sebagai tolak ukur kemampuan sumber daya manusia:
1. Kelola kelembagaan yaitu hal – hal yang berkaitan dengan administrasi kelompok
 2. Kelola kawasan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan kelompok dalam mengelola kawasan
 3. Kelola usaha yaitu hal – hal yang berkaitan dengan kapasitas kelompok dalam mengelola usaha.

Sedangkan variabel kedua yaitu berdasarkan dokumen WWF tahun 2009 memiliki beberapa prinsip antara lain yaitu Pengembangan institusi masyarakat lokal dan kemitraan (Prinsip partisipasi masyarakat), prinsip ekonomi berbasis masyarakat (Prinsip partisipasi masyarakat), prinsip edukasi, serta prinsip pengembangan dan penerapan rencana tapak dan kerangka kerja pengelolaan lokasi ekowisata (prinsip konservasi dan wisata).

Analisis data dalam penelitian ini ada dua yaitu dilakukan dengan *system scoring* berdasarkan Peraturan Menteri No. 57 tahun 2014:

1. di bawah 350 : Kelas Pemula
2. 350 - 700 : Kelas Madya
3. Di atas 700 : Kelas Utama

Sedangkan analisis data berdasarkan dokumen WWF tahun 2009, perhitungan mengenai analisis pola pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat di Gunung Sempana menggunakan model perhitungan *skala likert* (Sugiono, 2013) dengan pemberian bobot 1-5 dengan penentuan tingkat kontribusi masyarakat terhadap pengelolaan dibagi menjadi 5 tingkat yaitu:

Tabel 1 Tingkat Kontribusi Masyarakat

No	Kriteria	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi (ST)	3.141 – 3.740
2	Tinggi (T)	2.543 – 3.140
3	Sedang (S)	1.945 – 2.542
4	Rendah (R)	1.347 – 1.944
5	Sangat Rendah (SR)	748 – 1.346

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai KPH Rinjani Timur dengan wilayah kerja di Kabupaten Lombok Timur mempunyai luas area 37.063,67 Ha, dengan fungsi Hutan Lindung (HL) seluas 31.498,67 Ha dan Hutan Produksi (HP) seluas 5. 565 Ha. Kawasan hutan tersebut terbagi menjadi 7 (tujuh) kelompok hutan yakni Gunung Rinjani (RTK 1), Gong (RTK 8), Petandakan (RTK 9), Kedatu (RTK 10), Rebanbela (RTK 11), Gili Lawang, Sulat dan Petagan (RTK 14), dan Sekaroh (RTK 15), yang berdasarkan administrasi pemerintahan kawasan hutan tersebut terletak pada 7 (tujuh) kecamatan yakni Kecamatan Sembalun, Sambelia, Suela, Aikmel, Wanasaba, dan Jerowaru. Pada kawasan Hutan Lindung Sembalun terdapat beberapa destinasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti Bukit Pergasingan, Bukit Nanggi, Anak Dara dan Sempana.

Kelompok wisata alam Gunung Sempana terbentuk dan disahkan pada tanggal 6 Juli 2020 bersamaan dengan pengesahan naskah kesepakatan bersama (NKK) antara BKPH Rinjani Timur no: 552.4/106/BKPH-RT/VII/2020 dengan KWA Gunung Sempana no: 002/KWA-Semp./VII/2020. KWA Gunung Sempana yang beranggotakan 38 Orang. Keanggotaan dalam KWA Gunung Sempana terdiri dari ketua, wakil, sekertaris dan anggota biasa.

1. Kapasitas Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Menteri No. 57 Tahun 2014

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/Menhut II/2014 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan yang sudah disesuaikan dengan penelitian ini. Ada tiga Instrumen Kriteria Penilaian Kemampuan Kelompok pengelola kawasan sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat dalam mengelola suatu kawasan sesuai dengan kebijakan pemerintah

Menurut Santoso, 2017 dalam menjalankan roda pemerintahan kapasitas kelembagaan tercermin dalam kinerja pegawai. Kapasitas kelembagaan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan dari keseluruhan elemen suatu organisasi baik dalam pola-pola hubungan didalam organisasi tersebut atau berbagai bentuk aktivitas didalamnya untuk dapat mencapai tujuan organisasi tersebut dengan efektif, efisien dan berkelanjutan. Sehingga tidak terjadi pemborosan baik itu tenaga, waktu ataupun elemen organisasi itu sendiri.

A. Kelola Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aspek penting dalam pengelolaan satu kawasan, karna dapat mengatur dan mengikat setiap anggota kelompok yang melakukan pengelolaan pada satu kawasan hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan yang telah di sesuaikan dengan penelitian ini, deskripsi mengenai tingkat kelola kelembagaan Kelompok Wisata Alam Gunung Sempana secara spesifik dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Aspek dan Indikator Kelola Kelembagaan

No	Aspek dan Indikator Kemampuan	Skors
1	Dasar hukum pendirian KWA	20
2	Kepengurusan	20
3	Keikutsertaan kaum wanita dalam kepengurusan dan anggota kelompok	0
4	Perencanaan Kegiatan Kelompok (RKK)	20
5	Keterlibatan pengurus dan anggota dalam setiap pelaksanaan kegiatan kelompok	15
6	Pemantauan dan evaluasi kegiatan kelompok	20
No	Aspek dan Indikator Kemampuan	Skors
7	Penetapan lokasi dan kelengkapan serta pengaktifan fungsi sekretariat nama KWA, papan informasi, pondok pertemuan, perpustakaan, peta wilayah kelola dll	15
8	Aturan dalam kelompok yang mengikat	10
9	Kelengkapan administrasi kelompok dibuktikan dengan adanya: buku tamu, buku daftar anggota, buku daftar hadir pertemuan, notulen rapat, buku kas, buku tabungan, buku simpan pinjam, buku inventaris barang, buku informasi, buku catatan hasil kegiatan	15
10	Frekuensi pertemuan/musyawarah KWA	10
11	Partisipasi dan kehadiran anggota kelompok	20
12	Keikutsertaan pengurus/anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan/kursus/magang) dalam 3 tahun terakhir	20
13	Jenis pelatihan yang diikuti pengurus/anggota (bidang teknis, kelembagaan, manajemen usaha, administrasi)	10
14	Keterlibatan KWA dalam program pemerintah /LSM /lembaga lainnya (kegiatan lomba, kampanye, gerakan-gerakan)	20
15	Jumlah kearifan lokal yang dikembangkan dalam kegiatan KWA	15
16	Jumlah kelompok baru yang terbentuk	0
17	Jumlah PKSM yang terbentuk	15
18	Jumlah kader pemimpin KWA (keterlibatan generasi muda dalam KWA)	15
Total skors		260

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap aspek dan indikator pada penilaian kelola kelembagaan yang telah dikelola oleh Kelompok Wisata Alam (KWA) Gunung Sempana didapatkan total skors penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 sebesar 260 poin.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan KWA Gunung Sempana ini dimasukkan ke kelas madya, ada beberapa aspek dan indikator yang mendukung seperti pada indikator dasar hukum pendirian kelompok tersebut yang telah di dasari oleh hasil naskah kesepakatan bersama (NKK) bersamaan dengan pembentukan kesepakatan kerja sama antara BKPH Rinjani Timur dengan

KWA Gunung sempana dalam pengelolaan kawasan Gunung Sempna sebagai kawasan ekowisata. Dalam konteks pariwisata, kelembagaan adalah komponen penting dalam menunjang keberhasilan pariwisata. Kelembagaan berperan dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat dalam upaya peningkatan potensi pariwisata (Triambodo & Damanik, 2015 *cit* Prafitri, dan Damayanti, 2016).

B. Kelola Kawasan

Selain kelola kelembagaan aspek yang penting dari sebuah pengelolaan yaitu aspek kelola kawasan. Berikut penilaian kapasitas kelembagaan pada aspek dan indikator kemampuan dalam kelola kawasan yang ada di KWA Gunung Sempna dapat di lihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Aspek dan Indikator Kelola Kawasan

No	Aspek dan Indikator Kemampuan	Skors
1	Pemahaman terhadap batas-batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan disekitarnya	20
2	Penataan dan pemetaan wilayah kelola	20
3	Pengenalan potensi dan daya dukung wilayah kelola	20
4	Identifikasi dan pemetaan permasalahan wilayah kelola dan kawasan hutan disekitarnya	20
5	Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi	30
6	Aktifitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi (penanaman lahan Kritis kosong/ tidak produktif, turus jalan, kanan kiri sungai dll)	30
7	Aktifitas kelompok dalam melakukan konservasi sumber daya hutan (perlindungan mata air, penangkaran flora dan fauna, pemanfaatan jasa lingkungan dll)	20
8	Dampak terhadap peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lingkungan (terbentuknya kelompok / organisasi peduli kehutanan)	10
9	Dampak terhadap lingkungan (penambahan sumber mata air, pengurangan lahan kritis, pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan kebakaran hutan dll)	20
10	Perolehan sertifikat pengelolaan hutan lestari (PHBML/SVLK dan lainnya)	20
Total skors		210

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada aspek dan indikator kelola kawasan didapatkan total skor penilaian yaitu 210 total poin. Total skor kelola kawasan di peroleh dari beberapa indikator, antara lain yaitu indikator pemahaman terhadap batas-batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan disekitarnya, Penataan dan pemetaan wilayah kelola, Pengenalan potensi dan daya dukung wilayah kelola serta indikator indikator lainnya yang menentukan tingkat kelola kawasan pada Gunung Sempna dan potensi yang ada.

Menurut Parihanta, *et al.*, (2017) Paradigma konservasi modern tidak hanya menekankan pada fungsi perlindungan (konservasi), namun juga harus menyentuh manfaat ekonomi dan sosial. Kelompok pengelola dalam melaksanakan pengelolaan suatu kawasan, baik itu kawasan hutan yang diperuntukan sebagai kawasan wisata tidak hanya memiliki hak untuk mengelola kawasan hutan sebagai tempat wisata alam tetapi juga memiliki kewajiban dalam pelestarian hutan. Salah satunya dengan rehabilitasi lahan, selain itu juga ikut andil dalam pelestarian flora dan fauna yang

ada pada sekitar kawasan, serta ikut andil dalam menjaga mata air yang ada sehingga satwa yang ada pada kawasan tetap terjaga.

C. Kelola usaha.

Faktor penting dalam pengelolaan kehutanan bukan hanya pada faktor kelola kawasan maupun kelola kelembagan, namun juga faktor penting lainnya yaitu kelola usaha. Dikarenakan dalam pengelolaan kehutanan bukan hanya melestarikan tetapi bisa juga memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat sekitar hutan dan ikut mengelola kawasan hutan secara lestari. Dalam pengelolaannya KWA Gunung Sempana melakukan pengelolaan pada kawasan Gunung Sempana yaitu pemanfaatan usaha jasa lingkungan.

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif masyarakat. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola ekowisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Dengan adanya pola ekowisata berbasis masyarakat bukan berarti masyarakat akan menjalankan usaha ekowisata sendiri (Hijriati, & Mardiana, 2014)

Tabel 4 Aspek dan Indikator Kelola Kawasan

No	Aspek dan Indikator Kemampuan	Skors
1	Modal awal kelompok	30
2	Pertambahan modal usaha dalam 3 tahun	10
3	Sumber penambahan modal usaha	0
4	Penambahan jenis usaha dalam 3 tahun	0
5	Penyelenggaraan temu usaha KWA dengan pelaku usaha	0
6	Pertambahan kemitraan dengan perjanjian /MoU dalam 3 tahun	0
7	Cakupan tujuan pemasaran hasil usaha kelompok	40
8	Peningkatan pendapatan kelompok	25
9	Pemanfaatan akses informasi dan teknologi dari berbagai sumber (instansi teknis, lembaga penelitian)	25
10	Penambahan penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok	25
JUMLAH TOTAL NILAI		155

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa jumlah total penilaian yang didapatkan bernilai 155 poin. Ada beberapa kategori dari aspek dan indikator penilaian berdasarkan nilai atau skors yang diperoleh setiap indikator penilaian yang ada. Pada penetapan NKK (Naskah Kesepakatan Kerjasama) oleh pihak pengelola 1 (BKPH Rinjani Timur) dengan pengelola 2 (KWA Gunung Sempana) dilakukan kesepakatan pengelolaan pada kawasan Gunung Sempana yang dikelola penuh oleh pihak pengelola pertama (KWA Gunung Sempana).

Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pengelola 1 dan pengelola 2 didapatkan bahwa pihak pengelola 2 hanya diperbolehkan melakukan pengelolaan dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan saja. Sedangkan dalam waktu yang ditentukan tidak boleh adanya penambahan hak pengelolaan kepada pihak pengelola kedua sebagai mitra dalam kurun waktu pengelolaan yang telah ditentukan. Oleh karena itu KWA Gunung Sempana sekarang hanya berfokus pada pemanfaatan jasa lingkungan saja yaitu pengelolaan ekowisata di kawasan Gunung Sempana.

A. Pengembangan institusi masyarakat lokal dan kemitraan (Prinsip partisipasi masyarakat)

Tabel 5 Data Analisis Prinsip Pengembangan Institusi Masyarakat Lokal dan Kemitraan

No	Kriteria dan Indikator	Total Skors
1	Adanya MOU antara pengelola dengan mitra	88
2	Adanya pemasaran dan promosi ekowisata dari pihak mitra maupun pihak pengelola	89
3	Adanya evaluasi	91
4	Adanya kesepakatan pembagian hasil antara pihak pengelola 1 dan pihak pengelola 2	88
5	Adanya laporan keuangan pada pengelola 2 kepada pihak pengelola 1	82
Total Skors		876

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Tabel 6 Tingkat Kontribusi Masyarakat Pada Prinsip Pengembangan Institusi Masyarakat Lokal dan Kemitraan

No	Kriteria	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi (ST)	925 – 1.100
2	Tinggi (T)	749 – 924
3	Sedang (S)	573 – 748
4	Rendah (R)	397 – 572
5	Sangat Rendah (SR)	220 – 369

Dalam wawancara yang dilakukan menggunakan teknik snowball dan juga sensus terhadap pengurus inti, anggota dan juga anggota KWA Gunung Sempana serta BKPH Rinjani Timur Resort sembalun. Kemudian pola kemitraan yang dibangun oleh BKPH Rinjani Timur dengan KWA Gunung Sempana sebagai mitra pengelola yaitu pola kemitraan berbasis masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam kemitraan tersebut adanya *sharing profit* yang pembagian hasilnya sebagian besar akan diberikan kepada pihak mitra yang telah melakukan pengelolaan. Sedangkan dari tingkat kriteria kontribusi mitra terhadap pengelolaan didapatkan total nilai sebesar 876 point.

Kemudian ketika melihat tabel tingkat kontribusi mitra pada prinsip pengembangan institusi masyarakat lokal dan kemitraan, dapat diketahui tingkat kontribusi mitra dan masyarakat terhadap pengelolaan yaitu berada pada kriteria tinggi (T). Faktor pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan baik yaitu masyarakat (KWA Gunung Sempana) menyadari bahwa pentingnya dilakukan pengembangan pada sektor sektor yang dapat memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat setempat sehingga masyarakat yang tidak memiliki atau kurang dalam segi ekonomi

dapat mendapatkan uang tambahan. Selain itu KWA Gunung Sempana juga menyadari bahwa pentingnya memajukan desa melalui potensi yang ada.

B. Ekonomi berbasis masyarakat (Prinsip partisipasi masyarakat)

Tabel 7 Data Analisis Pada Prinsip Ekonomi Berbasis Masyarakat

No	Kriteria dan Indikator	Total Skors
1	Adanya pelatihan bagi para pemandu wisata yang di sediakan	92
2	Adanya sertifikasi bagi para pemandu wisata	31
3	Adanya fasilitas pendukung seperti hotel maupun homestay bagi wisatawan	48
4	Adanya fasilitas rumah makan disekitar ekowisata	93
5	Adanya papan informasi pada jalur pendakian	88
6	Adanya pemandu wisata yang dapat menjelaskan potensi yang terdapat pada jalur pendakian	90
Total Skors		442

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Tabel 8 Tingkat Kontribusi Masyarakat Pada Prinsip Ekonomi Berbasis Masyarakat

No	Kriteria	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi (ST)	557 – 660
2	Tinggi (T)	451 – 556
3	Sedang (S)	345 – 450
4	Rendah (R)	239 – 344
5	Sangat Rendah (SR)	132 – 238

Salah satu pemanfaatan hutan secara tidak langsung adalah pemanfaatan jasa lingkungan hutan untuk wisata. Pelaksanaan program wisata telah sering dilakukan, namun seringkali tidak melibatkan masyarakat. Padahal melalui kegiatan wisata masyarakat mampu memperoleh keuntungan secara ekonomi sekaligus dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan sumberdaya kawasan hutan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bentuk program wisata yang memposisikan masyarakat bukan hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek dari kegiatan wisata tersebut (Hayati, 2014)

Dengan melihat total nilai yang dikumpulkan melalui teknik sensus dengan total nilai sebesar 442 poin. Diketahui tingkat kontribusi mitra dalam pengelolaan khususnya pada prinsip ekonomi berbasis masyarakat yaitu berada pada tingkat kriteria sedang (S). Dengan melihat tingkat kontribusi tersebut dapat menjadi tolak ukur bagaimana pola kemitraan yang berjalan antara BKPH Rinjani Timur dengan pihak mitra, pola yang dibangun adalah pola kemitraan berbasis masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan khususnya pada prinsip ekonomi berbasis masyarakat, pada prinsip tersebut pihak mitra dirasa belum maksimal. Dalam melakukan pengelolaan, masyarakat khususnya KWA Gunung Sempana sebagai mitra belum mampu menyadari potensi pertumbuhan usaha dan bidang jasa yang dapat dikembangkan dalam menunjang keberhasilan pengelolaan. Dengan banyaknya usaha dan bidang jasa pada sekitar kawasan bukan hanya memudahkan wisatawan namun juga dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan.

Faktor faktor yang menyebabkan kurang maksimal dalam membangun usaha kreatif dan jasa yaitu salah satunya dikarenakan faktor tingkat pendidikan yang tidak merata secara maksimal. Menurut Basyit, A (2020) Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah

pendidikan. Pendidikan berkenaan dengan pengembangan pengetahuan serta keahlian dan keterampilan dari manusia maupun tenaga kerja dalam proses pembangunan. Berhubung dengan kontribusinya yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi, maka pendidikan dikatakan sebagai modal manusia (*human capital*). Oleh karena itu pendidikan perlu ditingkatkan serta persebarannya jauh lebih merata.

C. Prinsip Edukasi

Tabel 9 Data Analisis Prinsip Edukasi

No	Kriteria dan Indikator	Total Skors
1	Adanya kegiatan dalam melestarikan lingkungan	88
2	Adanya upaya masyarakat dalam membangun konsep lingkungan lestari pada kawasan	91
3	Adanya upaya clean up kawasan dari pihak pengelola maupun masyarakat sekitar	90
4	Adanya pendidikan konservasi bagi pihak pengelola maupun masyarakat	84
5	Adanya pelatihan dalam pengelolaan sampah bagi masyarakat sekitar	86
6	Adanya arahan atau himbauan bagi wisatawan tentang menjaga lingkungan pada saat memulai pendakian	92
No	Kriteria dan Indikator	Total Skors
7	Adanya papan informasi ataupun himbauan dalam menjaga kebersihan di jalur pendakian maupun <i>basecamp</i>	89
8	Adanya paket wisata yang mengajarat wisatawan dalam pengelolaan baik itu pengelolaan sampah maupun edukasi pengelolaan alam	78
Total Skors		698

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Tabel 10 Tingkat Kontribusi Masyarakat Pada Prinsip Edukasi

No	Kriteria	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi (ST)	741 – 880
2	Tinggi (T)	600 – 740
3	Sedang (S)	459 – 599
4	Rendah (R)	318 – 458
5	Sangat Rendah (SR)	176 – 317

Dari beberapa indikator yang ada menyatakan bahwa pengelolaan khususnya pada prinsip edukasi telah dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak mitra dalam melakukan pengelolaan Gunung Sempana dengan pihak pengelola yaitu BKPH Rinjani Timur. Sehingga dapat diketahui bahwa pola kemitraan yang dijalin oleh kedua belah pihak yaitu pola kemitraan yang berbasiskan masyarakat dengan memberikan hak kepengelolaan pada kawasan hampir seluruhnya dilakukan oleh pihak mitra dengan pihak pengelola yaitu BKPH Rinjani Timur sebagai pengawasnya.

Dari hasil pengukuran data dengan teknik sensus terhadap anggota KWA Gunung Sempana dapat diketahui bahwa total nilai yang didapatkan sebesar 698 poin. Kemudian dapat diketahui tingkat kontribusi mitra dalam pengelolaan dengan melihat tabel kriteria tingkat kontribusi mitra terhadap pengelolaan khususnya pada prinsip edukasi. Dengan melihat tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi mitra terhadap pengelolaan yaitu pada kriteria tinggi (T). Oleh karena itu dapat diketahui bahwa pola kemitraan yang dibangun oleh BKPH Rinjani Timur dengan KWA Gunung Sempana merupakan pola kemitraan yang berbasis masyarakat. dikarenakan

masyarakat diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan atas kawasan tersebut secara penuh namun tetap ada pembagian hasil antara kedua belah pihak.

D. Pengembangan dan Penerapan Rencana Tapak dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lokasi Ekowisata (prinsip konservasi dan wisata)

Tabel 11 Data Analisis Pada Prinsip Pengembangan dan Penerapan Rencana Tapak dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lokasi Ekowisata

No	Kriteria dan Indikator	Total Skors
1	Adanya fasilitas pendukung yang di bangun tanpa merusak ekosistem disekitar kawasan	88
2	Adanya fasilitas umum yang dibangun pada ekosistem yang unik dan rentan	57
3	Adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan fasilitas umum	101
4	Adanya fasilitas umum yang dibangun berdasarkan tradisi lokal	52
5	Adanya peraturan mengenai sampah pada kawasan	88
6	Adanya fasilitas tempat sampah di <i>basecamp</i> maupun di jalur pendakian	88
No	Kriteria dan Indikator	Total Skors
7	Adanya bank sampah pada sekitar kawasan	91
8	Adanya kegiatan reboisasi atau penanaman kembali pada kawasan	90
9	Adanya paket wisata yang memasukan tradisi lokal baik itu seni maupun budaya	44
10	Adanya paket wisata yang memasukan kegiatan sehari hari masyarakat menjadi atraksi ekowisata	73
Total Skors		772

Sumber: Data primer diolah tahun 2021

Tabel 12 Tingkat Kontribusi Masyarakat Pada Prinsip Pengembangan dan Penerapan Rencana Tapak dan Kerangka Kerja Pengelolaan Lokasi Ekowisata

No	Kriteria	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi (ST)	925 – 1.100
2	Tinggi (T)	749 – 924
3	Sedang (S)	573 – 748
4	Rendah (R)	397 – 572
5	Sangat Rendah (SR)	220 – 369

Dari hasil pengukuran data dengan teknik sensus terhadap anggota KWA Gunung Sempana dapat diketahui bahwa total nilai yang didapatkan sebesar 772 poin. Kemudian dapat diketahui tingkat kontribusi mitra dalam pengelolaan dengan melihat tabel kriteria tingkat kontribusi mitra terhadap pengelolaan, khususnya pada prinsip pengembangan dan penerapan rencana tapak dan kerangka kerja pengelolaan lokasi ekowisata dengan melihat tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi mitra terhadap pengelolaan yaitu pada kriteria tinggi (T).

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan faktor faktor pendukung seperti ikut sertanya masyarakat dalam pengelolaan secara merata, baik pada bidang satu maupun yang lainnya. Menurut Yusuf, A. W. (2014) Peran serta masyarakat adalah sebagai bagian sentral dalam strategi pembangunan dalam segala bidang. Bila masyarakat mulai berperan serta dalam seluruh aspek pembangunan,

yaitu mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat, maka tujuan-tujuan pembangunan akan tercapai pula dengan sendirinya.

Dari sekian banyaknya indikator penilaian yang ada dapat disimpulkan bahwa pola kemitraan yang dibangun oleh BKPH Rinjani Timur dengan KWA Gunung Sempana khususnya pada prinsip pengembangan dan penerapan rencana tapak dan kerangka kerja pengelolaan lokasi ekowisata merupakan pola kemitraan berbasikan masyarakat. Pola kemitraan seperti ini membebaskan pihak mitra melakukan pengelolaan dengan maksimal namun tetap dengan memperhatikan kelestarian alam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan yang telah disesuaikan, penentuan tingkat kapasitas kelembagaan pada KWA Gunung Sempana berada pada kelas madya. Dari tiga aspek tersebut didapatkan total skor sebesar 625 poin. Berdasarkan Dokumen WWF tahun 2009 yang telah disesuaikan dengan penelitian kali ini, dari keempat aspek yang telah di analisis didapatkan kesimpulan bahwa pola kemitraan yang dibangun oleh kedua belah pihak yaitu BKPH Rinjani Timur dengan KWA Gunung Sempana adalah bentuk pola kemitraan ekowisata berbasikan masyarakat yaitu bentuk pola kemitraan yang memberikan kewenangan penuh kepada masyarakat khususnya KWA Gunung Sempana sebagai kelompok pengelola kawasan tersebut dalam melakukan pengelolaan namun tetap adanya *sharing profit* antara kedua belah pihak. Saran dalam penelitian sebagai berikut: Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan KWA Gunung Sempana kedepannya. Perlu dilakukan lagi pengembangan dan memaksimalkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan serta melibatkan kaum wanita dalam pengelolaan. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait tingkat kontribusi masyarakat dalam pengelolaan untuk memaksimalkan sistem dan pola pengelolaan di kawasan ekowisata Gunung Sempana.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbariandhini, M., & Prakoso, A. F. (2020). Analisis Faktor Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan Terhadap Pendapatan Di Indonesia Berdasarkan IFLS-5. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 4(1), 13-22.
- Basyit, A., Sutikno, B., & Dwiharto, J. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal EMA*, 5(1).
- Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan WWF-Indonesia. 2009. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*.
- Diakses dalam <http://awsassets.wwf.or.id/downloads/>
- Hakim, N., Hayati, S., Lumbu, A. A., Rahmawati, N. I., & Septiyana, L. (2019). Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Mengembangkan Ekowisata Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 235-254.

Hayati, N. (2014). *Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Desa Tompobulu Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung*. *Buletin Eboni*, 11(1), 45-52.

Hijriati, E., & Mardiana, R. (2014). *Pengaruh ekowisata berbasis masyarakat terhadap perubahan kondisi ekologi, sosial dan ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi*. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3), 146-159.

Masyhudi, L. (2018). *Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal di Teluk Serawe Lombok Timur*. *Media Bina Ilmiah*, 13(2), 913.

P.57/MENHUT-II/2014

Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). *Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)*. *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76-86.

Prihanta, W., Syarifuddin, A., & Zainuri, A. M. (2017). *Pembentukan kawasan zekonomi melalui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat*. *Jurnal Dedikasi*, 14, 73-84.

[Siyoto](#). S & [Sodik](#), Muhammad Ali , 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta. Literasi Media Publishing

Santoso, E. 2017 *Analisis Kapasitas Kelembagaan Dan Akuntabilitas Kepemimpinan Perangkat Desa Terhadap Implentasi UU No 6 Tahun*

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. ALFABETA.

Yusuf, A. W. (2014). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).